

**Evaluasi Perencanaan Pembangunan  
Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan *Analytic  
Hierarchy Procces (AHP)***

**Santy Sriharyati <sup>1</sup>**

**Program Studi Administrasi Bisnis  
Politeknik LP3I Bandung**

**Email: santysriharyati@plb.ac.id**

**Lulu Ulfa Sholihannisa <sup>2</sup>**

**Program Studi D3 Manajemen Informatika**

**Program Studi Manajemen Informatika  
Politeknik LP3I Bandung**

**Email: mfha15feb@gmail.com**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan, dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja atau pelaksanaan pembangunan, dimana stakeholder memegang peranan penting dalam perencanaan dan evaluasi. Dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan pembahasan target yang sudah atau belum tercapai maupun program kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Renstra yang telah ditetapkan. Metode evaluasi yang digunakan pada penelitian adalah metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari aspek berbeda, yaitu 1) indikator kinerja pembangunan dan 2) evaluasi kinerja dengan menggunakan AHP yang meliputi indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup, daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan investasi, ketaatan terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, indeks kepuasan masyarakat, inflasi dan jumlah penduduk.

**KATA KUNCI:** Evaluasi, Manajemen, Perencanaan, Pembangunan

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dilakukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menciptakan kesejahteraan sosial, dirancang oleh pemerintah dan seluruh tingkatannya serta dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (stakeholder). Pernyataan ini secara implisit mengedepankan pentingnya pembangunan berdasarkan kebutuhan, pemerataan pembangunan, sinkronisasi dan sinergi serta penguatan koordinasi dalam proses pembangunan, termasuk tahap perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi utama pelaksana perencanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota perlu senantiasa memperkuat koordinasi guna menciptakan sinergi dan sinkronisasi perencanaan yang berdasar kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bandung Barat “Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Wilayah” adalah Membangun Ekonomi Daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumberdaya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor, serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan ini berangkat dari keseragaman potensi sumber daya alam Kabupaten Bandung Barat yang secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi barometer pertumbuhan kawasan Provinsi Jawa Barat. Adapun upaya yang dilakukan dalam mendukung pembangunan adalah dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dengan unit analisis tingkat kecamatan, guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih memberikan dampak bagi upaya penciptaan kesejahteraan sosial secara agregat di masing-masing tingkatan pemerintahan.

Tujuan Pelaksanaan Analisis Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah untuk Memperkuat koordinasi perencanaan provinsi dan kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan Kabupaten Bandung Barat yang terkait dengan indikator kinerja pembangunan serta sinergi dengan kebijakan-kebijakan provinsi dan pusat yang berbasis analisa data.

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat meliputi substansi pekerjaan sebagai berikut:

1. Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 2013-2017.
2. Penyusunan Data Realisasi program dan kegiatan dalam kurun waktu 2013-2017 melalui pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
3. Analisa kebijakan perencanaan pembangunan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*, untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan sesuai dengan indikator kinerja pembangunan.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan aktivitas dalam manajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan, ataupun pertanggungjawaban (Mustopadidjaja, 2003). Setiap tahapan berisi kegiatan pengumpulan dan analisis mengenai data dan informasi serta pelaporan mengenai tingkat perkembangan capaian hasil kegiatan pelaksanaan, ketepatan sistem dan proses pelaksanaan, dan ketepatan kebijakan serta akuntabilitas kelembagaan secara keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan pada tahap pemantauan didasarkan atas hasil dari pelaksanaan pemantauan. Dengan kata lain hasil dari pelaksanaan pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi juga menyediakan informasi yang kredibel dan berguna, dan juga menghasilkan *feedback* yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan yang akan datang. Perencanaan yang dikombinasi dengan monitoring dan evaluasi dapat berperan penting dalam peningkatan efektifitas program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan membantu untuk fokus pada hasil, sedangkan monitoring dan evaluasi membantu untuk mempelajari kesuksesan dan tantangan di masa lampau dan memberikan informasi untuk pembuatan keputusan sehingga periode saat ini dan masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Dengan demikian antara perencanaan, monitoring, dan evaluasi memiliki keterkaitan dan membentuk suatu siklus.

### 2. Tujuan Evaluasi

Tujuan umum dari evaluasi adalah memberikan masukan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan program, kebijakan, dan strategi, serta ditujukan pula untuk akuntabilitas dan transparansi, sedangkan tujuan khusus dari evaluasi adalah untuk menentukan

kerelevansian obyek, efisiensi, dan efektifitas terhadap pencapaian obyek, dan mengukur dampak dan keberlanjutan dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan. Namun secara spesifik, tujuan evaluasi menurut Crawford (2000) terdiri dari:

- a) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- c) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Dengan demikian tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

### 3. Manfaat dan Kegunaan Evaluasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi (Lohman, 2003). Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja (Werther dan Davis, 1996:346).

Prinsip-prinsip penerapan perencanaan dan penganggaran kinerja yaitu 1) alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*), 2) keluwesan pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*), 3) anggaran mengikuti fungsi (*money follow function*), fungsi diikuti struktur organisasi (*function followed by structure*) (Randy R Wrihatnolo, 2010).

**Tabel 1. Indikator Kinerja dan Turunan di Kabupaten Bandung Barat**

No	Indikator Kinerja Daerah	Indikator Turunan
1	Rata-rata Lama sekolah	Indikator Input :
2	Angka Melek Huruf/Harapan	- Rasio murid-guru

	Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sekolah</li> <li>- Pendidikan kepala rumah tangga</li> </ul> <p>Indikator proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak ke sekolah</li> <li>- Angka partisipasi sekolah</li> <li>- Angka partisipasi kasar</li> <li>- Angka partisipasi murni</li> </ul>
3	Angka Harapan Hidup	<p>Indikator Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata umur kawin pertama</li> <li>- Fasilitas tempat buang air besar</li> <li>- Sumber air minum yang digunakan</li> <li>- Ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit bersalin, poliklinik puskesmas, puskesmas pembantu)</li> <li>- Jumlah tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat)</li> <li>- Indikator proses</li> <li>- Jumlah kunjungan ke Puskesmas</li> <li>- Jumlah kunjungan ke Rumah sakit</li> <li>- Jumlah Anak yang mendapat imunisasi</li> </ul>
4	Daya Beli Masyarakat	<p>Indikator Input :</p>

5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	- Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan  Indikator proses :  - Jumlah pencari kerja terdaftar
6	%tase Penduduk Miskin	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	

Sumber : Bappeda Jawa Barat 2016

#### 4. Pengukuran Evaluasi Kinerja Dengan Menggunakan AHP

Metode *Analytic Hierarchy Process* dikembangkan oleh Thomas L. Saaty sekitar tahun 1970 ketika di Warston School. Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian-penilaian dan nilai-nilai pribadi ke dalam satu cara yang logis. **Analytic Hierarchy Process (AHP)** dapat menyelesaikan masalah multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Masalah yang kompleks dapat di artikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (*multikriteria*), struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia.

Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan dengan metode AHP pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a) Mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
- b) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di rangking.
- c) Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatas. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat-tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
- d) Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen didalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
- e) Menghitung nilai *Eigen Vektor* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai *Eigen Vektor* yang dimaksud adalah nilai *Eigen Vektor*

maksimum yang diperoleh dengan menggunakan *matlab* maupun dengan manual.

- f) Mengulangi langkah, 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
- g) Menghitung *Eigen Vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *Eigen Vektor* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintetis pilihan dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
- h) Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan  $CR < 0,100$  maka penilaian harus diulangi kembali.

## METODE PENELITIAN

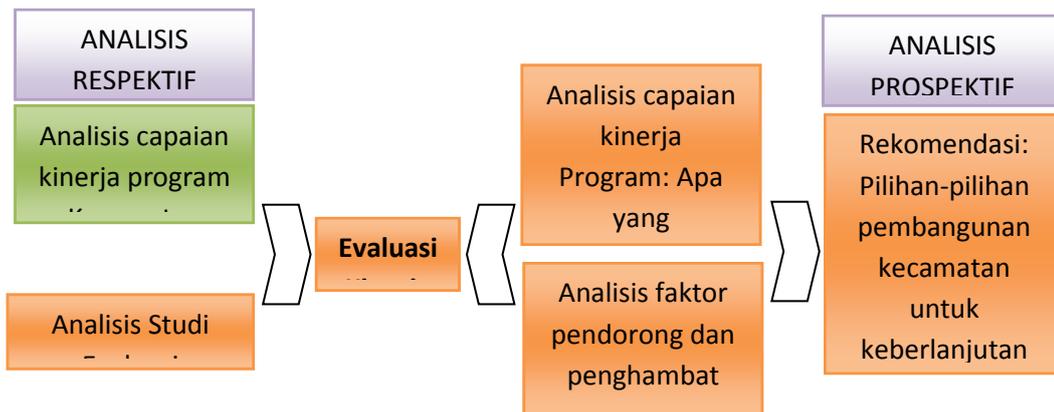
Metode penelitian yang digunakan adalah metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk membandingkan target dengan capaian, kemudian membandingkan pula antara capaian yang telah diperoleh dengan capaian dari provinsi lain (dalam satu pulau) dan juga capaian secara kabupaten. Jenis data yang digunakan untuk evaluasi adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari BPS, SKPD, dan juga Instansi daerah/SKPD. Data primer juga diperoleh dari SKPD melalui FGD dan wawancara mendalam.

*Design study* yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan study deskriptif dimana menggambarkan besarnya evaluasi kinerja, fokus pada pendalaman variabel-variabel yang dievaluasi. Pendalaman tersebut meliputi:

1. Pemilihan pengukuran evaluasi kinerja: dilihat dari beberapa tipe kriteria yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.
2. Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam evaluasi kinerja ini adalah analisis dokumentasi.
3. Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan.
4. Perbaikan (*refinement*): meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau

peningkatan (*reinforcement*) data baru terhadap kategori yang telah ditemukan.

Dengan demikian, *design study* pada evaluasi kinerja ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1. Evaluasi Kinerja**

Unit data yang dibutuhkan dalam Kegiatan Kajian Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1. Data sekunder yang diperoleh dari SKPD di Kabupaten Bandung Barat tentang program dan kegiatan dengan capaian realisasi dalam kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Bandung Barat, meliputi pembangunan sektor publik melalui pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Pendanaan Swasta dan/atau swadaya masyarakat;
2. Data berupa Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Daya Beli Masyarakat, Laju Pertumbuhan Ekonomi, %tase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu 2013-2015;
3. Data hasil Focus Group Discussion (FGD), diskusi dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan data penunjang lainnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Indikator Kinerja Pembangunan

Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 2013-2017, yang terdiri dari 16 Indikator yang mempengaruhi perkembangan pada Kabupaten Bandung Barat, antara lain: Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Daya Beli Masyarakat, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Investasi, Ketaatan terhadap RTRW, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Inflasi dan Jumlah Penduduk.

Dari ke 16 indikator kinerja tersebut, dengan metode wawancara dengan stake holder serta studi literatur, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan bantuan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* menggunakan program expert choice maka diperoleh ranking tentang pentingnya (urgent) program tersebut untuk dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*, faktor yang paling berpengaruh terhadap Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat adalah Indeks Pembangunan Manusia (14,7%), Laju Perumbuhan Investasi (10,3%), Laju pertumbuhan Ekonomi (9,3%), Inflasi (8,3%) dan Tingkat Kemiskinan (8,2%). Ke 6 Indikator kinerja tersebut harus menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Bandung Barat karena dari total dari ke 5 indikator diatas memengaruhi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Bandung Barat sebesar 53,5%. Adapun ke-10 indikator selain indikator diatas yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (6,9%), Daya Beli Masyarakat (6,8%), Angka Harapan Hidup (5,7%), Indeks Kepuasan Masyarakat (5,6%), Jumlah Penduduk (5%), Ketaatan terhadap RTRW (4,6%), Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (3,7%), Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (3,6%), Indeks Gini (ketimpangan pengeluaran) (3,4%), Angka Melek Huruf (2,2%), Rata-rata Lama Sekolah (1,7%), dan mempengaruhi total sekitar 46,5%. Artinya pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kinerja harus melaksanakan ke 16 indikator tersebut berdasarkan skala prioritas mengingat penting dan besarnya pengaruh indikator tersebut terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Compare with respect to: Goal: Pemilihan Program Prioritas

	Indeks Per	Rata-rata L	Angka Melek	Angka Hari	Daya Beli	Tingkat Ke	Tingkat P	Indeks Gir	Laju Pertu	Laju Pertu	Ketaatan te	Rasio Ruw	Proporsi pu	Indeks Kep	Inflasi	Jumlah Pe
Indeks Pembangunan Manusia		5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0
Rata-rata Lama Sekolah			3.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0
Angka Melek Huruf				3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Angka Harapan Hidup					1.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
Daya Beli Masyarakat						3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Tingkat Kemiskinan							3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
Tingkat Pengangguran Terbuka								3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
Indeks Gini									5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
Laju Pertumbuhan Ekonomi										3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0
Laju Pertumbuhan Investasi											5.0	5.0	5.0	3.0	1.0	1.0
Ketaatan terhadap RTRW													1.0	1.0	3.0	5.0
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah														1.0	3.0	3.0
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik															3.0	3.0
Indeks Kepuasan Masyarakat																1.0
Inflasi																3.0
Jumlah Penduduk																5.0

Model Name: AHP BAndung Barat

Synthesis: Summary

Gambar 2 pemilihan program prioritas

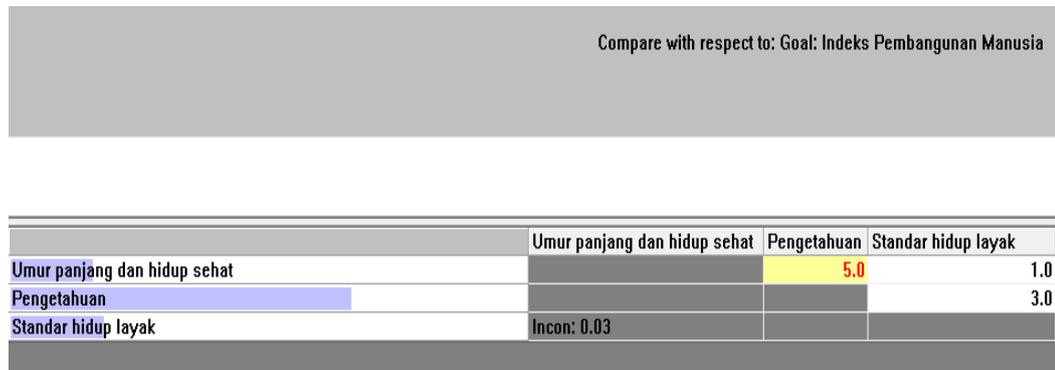


Gambar 3 AHP Bandung Barat

## 2. Evaluasi Kinerja dengan Menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process)

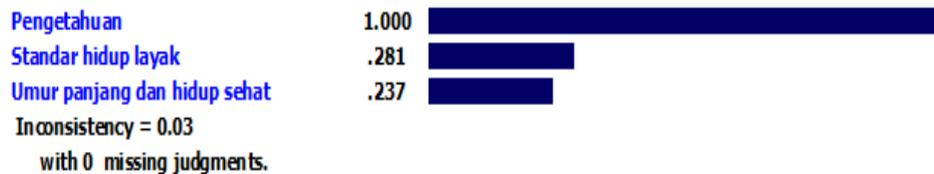
### Indeks Pembangunan Manusia

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) – (Human Development Index) menggambarkan tiga dimensi kehidupan manusia, yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living standard*).



Model Name: AHP Indeks Pembangunan Manusia

Priorities with respect to:  
Goal: Indeks Pembangunan Manusia



Gambar 4 Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), faktor tertinggi/terpenting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung Barat adalah Ilmu Pengetahuan. Untuk meningkatkan Ilmu Pengetahuan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana serta program wajib sekolah/belajar terhadap warga Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat adalah dengan cara meningkatkan standar hidup layak dan hidup sehat.

### Laju Pertumbuhan Investasi

Adalah sangat penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan investasi di Kabupaten Bandung Barat untuk menunjang dan meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk menarik investor agar melakukan investasi di Kabupaten

Bandung Barat, maka perlu diciptakan iklim tersebut dengan mengefisienkan perijinan dan peningkatan terhadap infrastruktur pendukung.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan tingkat pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto).

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 3 indikator, antara lain:

- a. Pendapatan per Kapita
- b. Kesejahteraan Penduduk
- c. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Compare the relative preference with respect to: Goal: Laju Pertumbuhan Ekonomi

	Kesejahteraan Penduduk	Tenaga Kerja dan Pengangguran	Pendapatan Perkapita
Kesejahteraan Penduduk		3.0	3.0
Tenaga Kerja dan Pengangguran			3.0
Pendapatan Perkapita	Incon: 0.13		

Model Name: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Priorities with respect to:  
Goal: Laju Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Faktor utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat adalah dengan cara meningkatkan pendapatan perkapita. Selanjutnya melakukan proram untuk kesejahteraan penduduk. Serta program untuk meingkatkan serapan terhadap tenaga kerja terutama angkatan kerja yang produktif sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat.

**Inflasi**

Inflasi dikatakan sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga barang-barang secara umum. Data inflasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 6 dibawah ini:

Compare with respect to: Goal: Tingkat Inflasi		
	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Indeks Harga Perdagangan Besar
Indeks Harga Konsumen (IHK)		5.0
Indeks Harga Perdagangan Besar	Incon: 0.00	

Model Name: AHP Inflasi

Priorities with respect to:  
Goal: Tingkat Inflasi



Gambar 6 Tingkat Inflasi

Inflasi terdiri dari 2 indikator, antara lain:

- a. Indeks Harga Konsumen (IHK)
- b. Indeks Harga Perdagangan Besar

Berdasarkan perhitungan terhadap indikator inflasi menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dengan bantuan program *expert choice* faktor terpenting adalah Indeks harga Konsumen (IHK). Indeks harga Konsumen (IHK) memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen terhadap barang dan jasa yang digunakan. Komponen kedua yang mempengaruhi inflasi adalah Indeks harga Pedagang Besar.

Tingkat Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah Head Count Index (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan

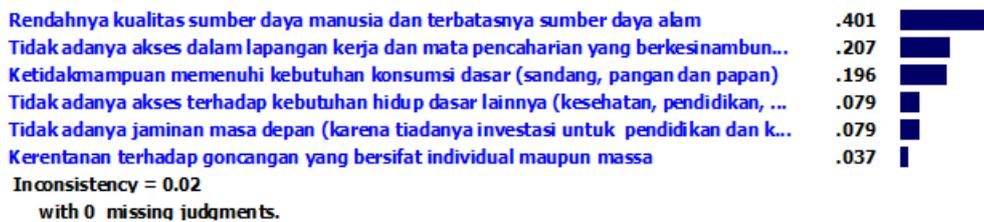
Compare with respect to: Goal: Tingkat Kemiskinan						
	Ketidakma	Tidak adanya akses	Tidak adan	Kerentanar	Rendahny	Tidak adan
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan)		3.0	3.0	5.0	3.0	1.0
Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)			1.0	3.0	5.0	3.0
Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)				3.0	5.0	3.0
Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa					7.0	5.0
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam						2.0
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan	Incon: 0.02					

(poverty line).

Model Name: AHP Tingkat Kemiskinan

Priorities with respect to:

Goal: Tingkat Kemiskinan



Gambar 7 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil olah data Tingkat kemiskinan dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* menggunakan program *expert choice* terhadap 6 indikator, dari nilai yang tertinggi (penting) hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari 2 macam, Sumber daya Alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (habis terpakai). Untuk mengolah sumber daya alam terutama Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDA) yang terampil dan ahli di bidangnya. Pemerintah Kabupaten Bandung wajib mencetak Sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaen Bandung (*link and match*). Cara yang paling mudah untuk melakukan hal ini adalah dengan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi.
  - a. Inilah prioritas utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
  - b. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
  - c. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).

- d. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- e. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- f. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa.

### Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut *An ILO Manual on Concepts and Methods* yang menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka merupakan masalah yang pasti ada di setiap daerah termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Bandung Barat yang pertama adalah melakukan pendataan jumlah dan keahlian/bidang minat terlebih dahulu, selanjutnya dibuka lapangan pekerjaan yang sesuai. Disamping itu, perlu dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan (*link and match*) di Kabupaten Bandung Barat.

### Daya Beli Masyarakat

Compare with respect to: Goal: Daya Beli Masyarakat					
	Konsumsi rumah tangga	Penjualan Ritel	Kredit Konsumsi	Kredit Properti	Penjualan kendaraan
Konsumsi rumah tangga		3.0	5.0	5.0	5.0
Penjualan Ritel			1.0	5.0	5.0
Kredit Konsumsi				5.0	3.0
Kredit Properti					3.0
Penjualan kendaraan	Incon: 0.09				

Model Name: AHP Daya Beli Masyarakat

Priorities with respect to:  
Goal: Daya Beli Masyarakat



Gambar 8 Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan hasil olah data Daya Beli Masyarakat dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* menggunakan program expert choice terhadap 5 indikator, dari nilai yang tertinggi (penting) hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:

- a. *Konsumsi rumah tangga*. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Pada Kabupaten Bandung Barat, Konsumsi rumah tangga menempati urutan paling tinggi untuk daya beli masyarakat.
- b. *Penjualan Ritel*. Pada Kabupaten Bandung Barat, Penjualan ritel menempati urutan ke 2 setelah konsumsi.
- c. *Kredit Konsumsi*. Kredit konsumsi merupakan pinjaman yang disalurkan pada individual. Oleh karena itu, kelayakan masing-masing nasabah untuk mendapatkan pinjaman akan dipertimbangkan masak-masak oleh pihak bank, termasuk dengan melakukan "BI checking" terhadap data Informasi Debitur Individual (IDI) historis di Biro Informasi Kredit Bank Indonesia. Kredit Konsumsi ini umumnya dikenali dalam bentuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan non-KPR.
- d. *Penjualan kendaraan*. Penjualan sepeda motor tumbuh 18,96% dan mobil penumpang tumbuh 3,25% pada kuartal II 2018. Sementara itu, penjualan motor dan mobil pada kuartal II 2017 masing-masing 10,93% dan 11,2%. Januari-September 2018, kendaraan niaga tumbuh sekitar 20,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Masuk dalam

kategori kendaraan niaga adalah segmen bus, truk, dan pick up. Bila melihat secara segmen pun masing-masing berhasil tumbuh cukup kencang. Pertumbuhan tertinggi terjadi di segmen kendaraan truk yang berhasil naik hingga 34,8% pada periode Januari – September tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu. Disusul oleh segmen *pick up* yang tumbuh 10,7%, dan bus tumbuh 7,2%.

- e. Kredit Properti. Pertumbuhan kredit properti pada Juli 2017 menunjukkan angka yang positif. Pertumbuhan tersebut terjadi baik di sektor konstruksi, real estate maupun kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Berdasarkan data uang beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit pada Juli 2017 tercatat sebesar Rp 755,1 triliun, meningkat 13,9% (*year on year/yoy*). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2017 yang sebesar 12,1% (*yoy*) atau senilai Rp 746,8 triliun. Masih dari data tersebut, pertumbuhan kredit properti terjadi di semua segmen, baik kredit konstruksi, *real estate*, maupun KPR dan KPA. Dari ketiga segmen tersebut, kredit konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 23,4% (*yoy*) jadi Rp 236,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2017 yang mencapai 20,8%.

### Angka Harapan Hidup

Perolehan angka harapan hidup dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Model Name: AHP Angka Harapan Hidup

Priorities with respect to:  
Goal: Angka Harapan Hidup



Inconsistency = 0.04  
with 0 missing judgments.

Compare with respect to: Goal: Angka Harapan Hidup

	Sosial	Ekonomi	Kesehatan	Pendidikan
Sosial		5.0	7.0	3.0
Ekonomi			1.0	1.0
Kesehatan				3.0
Pendidikan	Incon: 0,04			

Berdasarkan hasil olah data Angka Harapan Hidup dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* menggunakan program expert choice terhadap 4 indikator, dari nilai yang tertinggi (penting) hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan. Kesehatan merupakan indikator penting peringkat pertama untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. **Gambar 9 Angka Harapan Hidup** kesehatan sebagai program utama. Jejaring kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat perlu diperkuat.
- b. Ekonomi. Prioritas kedua untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hendaknya memetakan hasil bumi dari Masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan menciptakan atau memperkuat jalur distribusinya.
- c. Pendidikan. Prioritas ke 3 meningkatkan angka harapan hidup pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran di Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup.
- d. Sosial. Prioritas ke 4 meningkatkan angka harapan hidup sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Bandung Wajib menciptakan baik konsidi maupun tempat guna interaksi sosial masyarakatnya. Dengan adanya tempat dan konsidi interaksi

sosial, makan akan meingkatkan tingkat keceriaan (*happiness indeks*) masyarakatnya yang akan berakibat terhadap Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Barat.

### Indeks Kepuasan Masyarakat

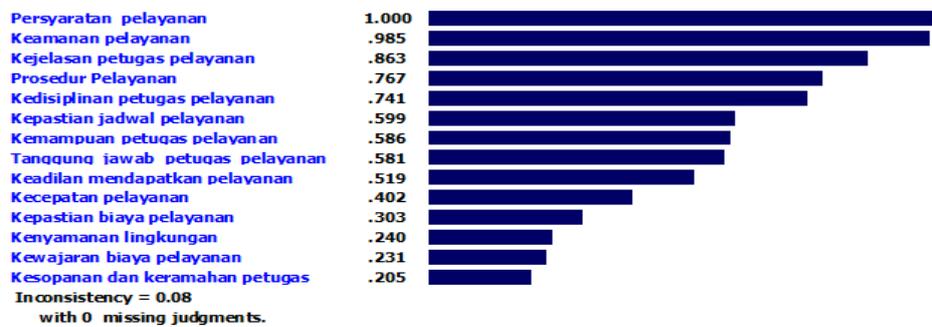
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep./25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Menurut Kep./25/M.PAN/2/2004 tersebut terdapat 14 unsur yang relevan, valid dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, seperti yang

Compare with respect to: Goal: Indeks Kepuasan Masyarakat														
	Prosedur	F. Persyarata	Kejelasan	Kedisiplin	Tanggung	Kemampu	Kecepatan	Keadilan m	Kesopanan	Kewajaran	Kepastian	Kepastian	Kenyaman	Keamanan
Prosedur Pelayanan		1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Persyaratan pelayanan			3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
Kejelasan petugas pelayanan				3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Kedisiplinan petugas pelayanan					1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	1.0	3.0	3.0
Tanggung jawab petugas pelayanan						1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
Kemampuan petugas pelayanan							3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Kecepatan pelayanan								1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
Keadilan mendapatkan pelayanan									3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Kesopanan dan keramahan petugas										1.0	1.0	3.0	1.0	3.0
Kewajaran biaya pelayanan											1.0	1.0	1.0	3.0
Kepastian biaya pelayanan													1.0	3.0
Kepastian jadwal pelayanan														3.0
Kenyamanan lingkungan														3.0
Keamanan pelayanan	Incon:	0.00												

tertuang dalam gambar 10 yaitu:

Model Name: AHP Indeks Kepuasan Masyarakat

Priorities with respect to:  
Goal: Indeks Kepuasan Masyarakat



Berdasarkan hasil olah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* menggunakan program expert choice terhadap 5 indikator, yaitu adalah Persyaratan pelayanan, keamanan pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, prosedur pelayanan dan kedisiplinan petugas pelayanan. Kelima indikator tersebut berhubungan dengan prosedur dan aturan. Indikator sisanya berhubungan dengan Sumber daya manusia sebagai pelaksana pekerjaan.

### Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar di Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan potensi yang dapat menunjang suksesnya pembangunan di kabupaten Bandung Barat. Penduduk perlu di kelola sejak awal, pendidikan warganya disesuaikan dengan potensi lapangan kerja yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat. Pembukaan sekolah/tempat pendidikan harus inline dengan lapanan kerja yang tersedia, sehingga angkatan kerja akan terserap yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran.

### **Ketaatan terhadap RTRW**

Rencana RTRW Kabupaten Bandung Barat harus inline (berdasarkan) RTRW Propinsi dan RTRW Nasional. Perijinan dan kegiatan pembangunan harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Bandung Barat.

### **Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Pemberian Ijin pembangunan harus memperhatikan rasio ruang terbuka hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

### **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bandung Barat baik yang berupa jalan Negara, jalan Propinsi, Jalan Kabupaten serta jalan desa harus diperihara dalam kondisi baik, karena jalan selain sebagai sarana transportasi juga merupakan sarana pembangkit ekonomi. Perekonomian akan tumbuh dengan cepat apabila ada akses jalan yang baik. Kondisi jalan harus di inventarisasi kondisinya, dan dibuatkan jadwal pemeliharannya. Selain itu perlu di inventarisasi juga kemungkinan dibuat jalan baru guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

### **Indeks Gini (ketimpangan pengeluaran)**

Digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan, apakah telah terjadi ketimpangan atau tidak.

### **Angka Melek Huruf**

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk jawa barat angka melek huruf adalah 99,08 (data BPS), hal ini adalah sangat baik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

### **Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Compare with respect to: Goal: Lama Sekolah

	Tingkat Kemiskinan	Beban ketergantungan	Lingkungan Tempat Tinggal
Tingkat Kemiskinan		3.0	3.0
Beban ketergantungan			3.0
Lingkungan Tempat Tinggal	Incon: 0.13		

Model Name: AHP Lama Sekolah

Priorities with respect to:  
Goal: Lama Sekolah



Gambar 11 AHP Lama Sekolah

Berdasarkan hasil olah data Rata-rata Lama Sekolah dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* menggunakan program *expert choice* terhadap 3 indikator, dari nilai yang tertinggi (penting) hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:

- a. **Tingkat Kemiskinan.** Tingkat kemiskinan merupakan indikator utama yang mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sama artinya dengan mempercepat rata-rata lama sekolah. Dengan cepatnya rata-rata sekolah, maka akan tersedia angkatan kerja yang produktif. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga harus siap dengan cara menyediakan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang produktif akan terserap.
- b. **Lingkungan Tempat Tinggal.** Rata-rata lama sekolah anak yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat berada pada

lingkungan yang tidak kondusif yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menempuh pendidikan.

- c. **Beban ketergantungan.** Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan.

## KESIMPULAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini merupakan indikator di level dampak (impact) yang merupakan akumulasi dari hasil (*outcome*) multi-aspek penyelenggaraan pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) diambil dari indikator sasaran strategis yang positioning-nya lebih ke arah dampak final/akhir (*final impact*) dari pembangunan.

Evaluasi perencanaan pembangunan telah dilakukan oleh Pemda Kab. Bandung Barat, masih belum optimal. Evaluasi telah dilakukan terhadap **Rencana Strategis (Renstra)** selain itu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, diantaranya adalah evaluasi terhadap **RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD**.

Evaluasi tersebut ada yang dilakukan secara tahunan, tengah periode, dan akhir periode. Secara umum, metode yang selalu digunakan untuk melakukan evaluasi adalah metode gap analysis dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari data/laporan yang ada.

Sebagian besar substansi yang dimuat dalam laporan tersebut mengenai realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjutnya. Untuk substansi tentang keberlanjutan program/kegiatan dan manfaat/hasil program/kegiatan tidak semua dilakukan. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada *user* (SKPD terkait) di Kabupaten Bandung Barat, walaupun hasil evaluasi tersebut tidak semuanya dapat digunakan, lebih bersifat dokumen laporan kegiatan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada beberapa instansi, diantaranya adalah Bappeda, SKPD terkait. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, oleh daerah dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses perencanaan periode selanjutnya.

Stakeholder memegang peranan penting dalam perencanaan dan evaluasi. Dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Keterlibatan *stakeholder* pada setiap tahapan evaluasi berfokus pada penilaian, penyusunan pertanyaan yang akan diajukan, pengidentifikasian

sumber yang dapat dipercaya berdasarkan bukti, dan meninjau kembali temuan serta penilaian interpretasi yang akan meningkatkan kredibilitas, potensi kegunaan dan keberlanjutan dari hasil evaluasi.

## SARAN

Dibutuhkan penyusunan pedoman evaluasi yang bersifat jelas, praktis, dan sistematis. Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebaiknya dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis evaluasi, yaitu: 1) **Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP)**; 2) Evaluasi Rencana Strategis; dan 3) **Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**.

Evaluasi dilakukan dalam rangka untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan, dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja atau pelaksanaan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sebaiknya dilakukan secara berkala. Perlu adanya tindak lanjut sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi yang telah disampaikan.

Memanfaatkan hasil evaluasi berkala untuk penetapan kinerja selanjutnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, dan memonitor hasil pencapaian penetapan kinerja secara berkala untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan kinerja.

Masyarakat di KBB harus meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan dan daya beli supaya dapat ikut berpartisipasi dalam mengisi pembangunan daerah dan memajukan KBB. Peran Pemerintah daerah KBB juga harus dapat memfasilitasi sarana dan prasarana lainnya yang ada agar mendukung meningkatkannya pembangunan di KBB.

Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan pemerataan wilayah kecamatan dan skala prioritas pembangunan di kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya membuat prioritas perencanaan pembangunan berdasarkan hasil perhitungan AHP, ada 5 (lima) komponen utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia, dimana Perkembangan IPM di KBB yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2. Laju Pertumbuhan Investasi, saat ini KBB merupakan Kawasan Perhatian Investasi. Namun belum menjadi 5 kota/kabupaten yang paling diminati.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi, terkait dengan pendapatan perkapita, kesejahteraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran
4. Inflasi, indeks harga konsumen (IHK) dan indeks harga perdagangan besar.
5. Tingkat Kemiskinan, merupakan salah satu permasalahan utama di KBB. Perlu adanya program-program penanggulangan kemiskinan dengan lintas sektor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. 2015. Kabupaten Bandung Barat dalam Angka Tahun 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. 2016. Kabupaten Bandung Barat dalam Angka Tahun 2015.
- Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2014. Kajian Evaluasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Crawford, John. 2000. Ed. 2. *Evaluation of Libraries and Information Services*. London: Aslib, the Association for Information Management and Information Management International.
- Lohman, 2003. Tersedia Online  
[mohmahsun.blogspot.com/2011/04/Indikator Kinerja](http://mohmahsun.blogspot.com/2011/04/Indikator_Kinerja)
- Mustopadidjaja, A.R. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Sugiono (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono (2018). "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)". Alfabeta, Bandung.
- Werther, W.B., and Davis, K. *Human Resources and Personnel Management*. 5th Ed. New York: MacGraw Hill, Inc, 1996
- Wibisono, Dermawan. 2011. **Manajemen Kinerja Korporasi dan Organisasi; Panduan Penyusunan Indikator**. Jakarta, Erlangga.
- Wrihatnolo, Randy R. 2010. Seri Manajemen Perencanaan Pembangunan. **Pendekatan Sektorial Dalam Perencanaan Pembangunan**. Jakarta: Institute for Development and Policy Study (IDPS).